



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2024 Page 1115-1129

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Strategi Tata Kelola Wisata Yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim: Kajian Literatur Di Bidang Administrasi Publik Dan Pengelolaan Destinasi

R. Moch. Agus Ramdhan^{1✉}

Akademi Pariwisata, Citra Buana Indonesia

Email : agusramdhan555@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perubahan iklim telah menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan sektor pariwisata, khususnya di wilayah yang memiliki kerentanan ekologis tinggi. Dalam situasi ini, kebutuhan akan tata kelola wisata yang bersifat adaptif menjadi semakin mendesak untuk menjaga ketahanan destinasi pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah strategi tata kelola pariwisata yang adaptif terhadap perubahan iklim dengan menggunakan pendekatan systematic literature review. Penelitian ini bersifat kualitatif dan mengkaji literatur akademik yang relevan dengan tema utama yaitu tata kelola wisata, perubahan iklim, dan pengelolaan destinasi. Pemilihan literatur dilakukan secara purposif berdasarkan kriteria kelayakan yang telah ditetapkan. Kajian ini mencakup literatur dari berbagai kawasan dunia, seperti Asia, Eropa, dan Australia, yang dianalisis melalui pendekatan tematik berdasarkan konteks sosial, kelembagaan, dan kebijakan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa tata kelola wisata yang adaptif ditandai oleh kemampuan kelembagaan untuk merespons dinamika perubahan, pelibatan aktif masyarakat lokal, serta adanya integrasi kebijakan lintas sektor. Keberhasilan strategi adaptasi juga ditentukan oleh kolaborasi multipihak antara aktor pemerintah, swasta, dan komunitas, dengan mempertimbangkan karakteristik lokal. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan kebijakan pariwisata yang inklusif, responsif, dan berbasis pada sistem adaptasi yang dinamis untuk menjawab tantangan perubahan iklim secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Governance Adaptif, Ketahanan Destinasi, Perubahan Iklim, Pengelolaan Pariwisata, Kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat.*

Abstract

Climate change has become a real threat to the sustainability of the tourism sector, especially in areas with high ecological vulnerability. In this situation, the need for adaptive tourism management has become increasingly urgent to maintain the resilience of tourism destinations. This study aims to examine adaptive tourism management strategies to climate change using a systematic literature review approach. This research is qualitative in nature and reviews academic literature relevant to the main themes of tourism management, climate change, and destination management. The literature was selected purposively based on predetermined eligibility criteria. This study covers literature from various regions of the world, such as Asia, Europe, and Australia, which were analysed using a thematic approach based on social, institutional, and public policy contexts. The results of the study indicate that adaptive tourism governance is characterised by institutional capacity to respond to changing dynamics, active involvement of local communities, and integration of cross-sectoral policies. The success of adaptation strategies is also determined by multi-stakeholder collaboration between government, private, and community actors, taking into account local characteristics. The implications of this study emphasise the importance of developing inclusive, responsive tourism policies based on dynamic adaptation systems to address climate change challenges in a sustainable manner.

Keywords: Adaptive Governance, Destination Resilience, Climate Change, Tourism Management, Public Policy, Community Participation.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim dewasa ini telah menjadi salah satu tantangan global yang paling signifikan, dengan implikasi serius terhadap berbagai sektor pembangunan, termasuk pariwisata. Sebagai sektor yang sangat bergantung pada stabilitas kondisi lingkungan dan iklim, pariwisata menghadapi ancaman serius akibat naiknya suhu global, kenaikan muka air laut, peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologis, dan perubahan pola musim (UNWTO, 2023; Gössling & Hall, 2021). Kondisi ini tidak hanya mengancam keberlanjutan destinasi wisata berbasis alam dan budaya, tetapi juga berpotensi mengganggu rantai nilai ekonomi pariwisata yang mendukung kehidupan masyarakat lokal. Di negara berkembang seperti Indonesia, sebagian besar destinasi wisata belum memiliki kebijakan adaptasi iklim yang terintegrasi secara sistematis dalam tata kelola sektor pariwisata (Bappenas, 2021). Oleh karena itu, penelitian mengenai strategi tata kelola wisata yang adaptif terhadap perubahan iklim menjadi sangat mendesak untuk segera dilakukan, guna mendukung transformasi kebijakan publik yang responsif terhadap dinamika krisis iklim serta menjamin keberlanjutan pembangunan pariwisata nasional.

Objek kajian yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada dua bidang utama, yakni administrasi publik dan pengelolaan destinasi pariwisata. Pemilihan kedua bidang ini

didasarkan atas asumsi teoretis bahwa tata kelola adaptif terhadap perubahan iklim memerlukan sinergi antara kebijakan publik yang inklusif dan praktik pengelolaan destinasi yang kontekstual. Administrasi publik, sebagai kerangka institusional negara, memegang peranan penting dalam perumusan kebijakan, alokasi sumber daya, serta penciptaan regulasi yang mampu mendorong praktik adaptasi iklim di sektor pariwisata (Hall, 2019; Dredge & Jenkins, 2011). Sementara itu, pengelolaan destinasi bertugas menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam strategi adaptasi di tingkat tapak melalui manajemen risiko, melibatkan pemangku kepentingan, dan pemanfaatan pengetahuan lokal. Berbeda dari objek kajian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek mitigasi karbon atau promosi pariwisata berkelanjutan secara umum, penelitian ini secara spesifik menelaah interaksi dan integrasi antara kebijakan publik dan pengelolaan destinasi dalam membangun sistem tata kelola wisata yang tangguh terhadap perubahan iklim.

Secara konseptual, penelitian ini bertumpu pada pendekatan *adaptive governance* yang merepresentasikan kerangka kerja dinamis dalam pengelolaan sumber daya di tengah ketidakpastian lingkungan. *Adaptive governance* didefinisikan sebagai kapasitas kelembagaan untuk merespons perubahan dan ketidakpastian melalui mekanisme pembelajaran sosial, fleksibilitas kebijakan, partisipasi multipihak, serta koordinasi lintas sektor dan skala (Folke et al., 2021). Dalam konteks ini, variabel strategi tata kelola berperan sebagai penggerak institusional untuk membentuk respons kolektif terhadap tekanan eksternal berupa perubahan iklim, sedangkan pengelolaan destinasi menjadi ruang aktualisasi kebijakan tersebut. Hubungan antar ketiga variabel—tata kelola, perubahan iklim, dan pengelolaan destinasi—merupakan fondasi konseptual untuk merumuskan model adaptasi yang efektif dalam sektor pariwisata.

Meskipun isu perubahan iklim dalam pariwisata telah banyak dibahas dalam literatur global, masih terdapat kesenjangan dalam pendekatan multidisipliner yang menggabungkan administrasi publik dan pengelolaan destinasi secara simultan dan kontekstual. Scott et al. (2019), misalnya, menyoroti dampak perubahan iklim terhadap sektor pariwisata global, namun belum banyak mengkaji aspek kelembagaan dan kebijakan adaptif di tingkat lokal. Gössling et al. (2021) lebih menitikberatkan pada strategi mitigasi emisi karbon di sektor transportasi dan akomodasi, tetapi belum menggali tata kelola adaptif dalam praktik pengelolaan destinasi. Di tingkat nasional, studi oleh Utama dan Widyastuti (2022) menyoroti penguatan kapasitas komunitas dalam menghadapi dampak iklim, namun belum mengintegrasikan kerangka adaptasi kelembagaan secara menyeluruh. Ketimpangan fokus dan pendekatan dalam literatur inilah yang menjadi dasar bagi penelitian ini untuk menawarkan sintesis baru yang lebih integratif.

Berdasarkan identifikasi kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi orisinal dalam bentuk kajian literatur multidisipliner yang mengintegrasikan perspektif administrasi publik dan pengelolaan destinasi guna merumuskan strategi tata kelola wisata yang adaptif terhadap perubahan iklim. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan *adaptive governance* yang digunakan sebagai lensa analisis utama dalam memahami sinergi antara kebijakan publik dan praktik pengelolaan destinasi dalam menghadapi tekanan ekologis global. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan manajemen destinasi, serta manfaat praktis bagi pembuat kebijakan, pengelola wisata, dan masyarakat dalam menyusun strategi pembangunan pariwisata yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan di tengah krisis iklim. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk merumuskan prinsip-prinsip strategis dan praktik tata kelola adaptif yang dapat diterapkan di berbagai konteks destinasi wisata guna memperkuat resiliensi sektor pariwisata nasional dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi literatur sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mensintesis temuan-temuan ilmiah yang relevan mengenai strategi tata kelola wisata yang adaptif terhadap perubahan iklim. Fokus utama kajian ini adalah menelaah keterkaitan antara kebijakan publik, dinamika lingkungan global, dan praktik pengelolaan destinasi melalui pendekatan multidisipliner. Strategi pengumpulan data dirancang secara terstruktur dan transparan guna menjamin validitas hasil sintesis literatur. Tahapan dalam pengumpulan data terdiri dari empat langkah utama, yaitu penetapan kriteria kelayakan literatur, penelusuran sumber informasi, strategi seleksi literatur, dan proses ekstraksi data (Yakin et al, 2023).

Kriteria kelayakan literatur ditetapkan untuk memastikan bahwa hanya artikel-artikel yang relevan dan berkualitas tinggi yang disertakan dalam sintesis. Artikel yang dipilih harus merupakan hasil penelitian primer (original research), studi kasus, atau kajian teoretis yang dipublikasikan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Literatur yang dipilih wajib membahas isu-isu utama yang berkaitan dengan tata kelola wisata, perubahan iklim, dan pengelolaan destinasi dalam konteks kebijakan dan manajemen publik. Selain itu, artikel harus secara eksplisit berfokus pada strategi adaptasi, kerangka tata kelola adaptif, atau praktik pengelolaan destinasi yang relevan dengan tantangan perubahan iklim. Rentang waktu publikasi yang digunakan adalah tahun 2000 hingga 2024, guna memastikan keterkinian pendekatan dan perkembangan teoritik dalam bidang yang dikaji. Penetapan kriteria tersebut merujuk pada metodologi *systematic literature review* yang

mengedepankan proses seleksi objektif dan transparan (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003).

Proses penelusuran sumber informasi dilakukan dengan mengakses berbagai pangkalan data ilmiah terkemuka yang diakui secara nasional maupun internasional. Basis data internasional yang digunakan antara lain Scopus, ScienceDirect, Emerald Insight, IEEE Xplore, PubMed, ABI/Inform, Academic Search Complete, ACM Digital Library, dan IGI Global. Sedangkan untuk tingkat nasional, pencarian dilakukan melalui Portal Garuda, SINTA, dan LIPI e-Resources. Selain itu, pendekatan *snowballing* diterapkan untuk menelusuri referensi sekunder yang tercantum dalam artikel-artikel terpilih, sebagai strategi memperluas cakupan literatur dan memperkaya kerangka konseptual (Wohlin, 2014). Artikel hasil pencarian dikelola dengan bantuan perangkat bibliometrik seperti *Publish or Perish* dan *Mendeley Reference Manager* guna memastikan keteraturan katalogisasi dan menghindari duplikasi data.

Seleksi literatur dilaksanakan dengan mengadopsi protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) sebagaimana dikembangkan oleh Moher et al. (2009). Seleksi dilakukan dalam tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah identifikasi awal, yaitu dengan menyaring artikel berdasarkan judul, abstrak, dan kata kunci yang sesuai dengan topik kajian. Kata kunci yang digunakan dalam proses ini antara lain *adaptive governance*, *climate change*, *tourism governance*, *destination management*, *sustainable tourism*, dan *policy adaptation*. Tahap kedua adalah skrining konten, di mana artikel yang telah teridentifikasi selanjutnya dibaca secara menyeluruh untuk menilai kesesuaian substansi dengan fokus penelitian. Tahap ketiga adalah pemeriksaan referensial, yakni dengan menelusuri daftar pustaka dari artikel terpilih guna menemukan literatur tambahan yang relevan. Artikel yang bersifat non-akademik, opini, atau editorial dikecualikan dari analisis.

Setelah proses seleksi, artikel yang lolos kemudian diekstraksi datanya secara manual ke dalam *data extraction form* yang telah disusun sebelumnya. Formulir ini mencakup informasi kunci seperti tipe artikel (empiris, teoritis, atau studi kasus), nama jurnal atau sumber publikasi, tahun terbit, topik utama, judul artikel, kata kunci, negara asal penelitian, dan pendekatan atau metodologi yang digunakan. Proses dokumentasi ini dirancang untuk mendukung klasifikasi literatur berdasarkan variabel tematik serta mempermudah analisis komparatif lintas artikel (Boell & Cecez-Kecmanovic, 2015).

Alur Penelitian atau Penulisan

Alur penelitian dalam kajian literatur ini dilakukan secara sistematis dan berjenjang. Tahap pertama dimulai dengan proses identifikasi literatur yang relevan dengan topik dan variabel penelitian, dilakukan melalui pencarian intensif pada berbagai basis data ilmiah. Setelah data terkumpul, penulis merumuskan rumusan masalah berdasarkan hasil eksplorasi awal dan kesenjangan dalam literatur yang ditemukan. Tahap selanjutnya adalah klasifikasi dan sintesis terhadap literatur terpilih, dengan mengelompokkan artikel berdasarkan tema dan variabel konseptual yang telah ditentukan sebelumnya. Akhirnya, proses penulisan diakhiri dengan interpretasi dan integrasi temuan literatur yang telah dianalisis, guna membangun model konseptual dan memberikan kontribusi teoritik maupun praktis terhadap pengembangan kebijakan tata kelola wisata yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan *content analysis* atau analisis isi. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pola-pola tematik, model-model tata kelola, serta pendekatan adaptasi yang digunakan dalam berbagai studi yang telah dikaji. Proses analisis dimulai dengan mengompilasi seluruh literatur yang telah memenuhi kriteria inklusi, kemudian dilanjutkan dengan menyintesis temuan-temuan utama dari masing-masing artikel, seperti bentuk intervensi kebijakan, kapasitas adaptasi kelembagaan, dan praktik pengelolaan destinasi. Selanjutnya, literatur diklasifikasikan berdasarkan kesesuaiannya dengan variabel utama yaitu: tata kelola wisata, perubahan iklim, dan pengelolaan destinasi.

Analisis ini juga mencakup identifikasi kesenjangan konseptual dalam literatur yang ada, yang kemudian digunakan untuk menyusun kerangka integratif berbasis pendekatan *adaptive governance*. Tahapan analisis dilakukan sesuai dengan prosedur tematik yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006), yang mencakup: (1) familiarisasi dengan data, (2) pengkodean awal, (3) identifikasi tema, (4) pengkajian tema, (5) penamaan tema, dan (6) penyusunan narasi sintesis. Dengan pendekatan ini, hasil kajian diharapkan tidak hanya mampu menjelaskan keadaan empiris di lapangan, tetapi juga memberikan arah konseptual baru yang berguna untuk perumusan kebijakan kepariwisataan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Seleksi Artikel

Proses seleksi literatur dilakukan berdasarkan pendekatan *systematic literature review* yang merujuk pada protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) sebagaimana dikembangkan oleh Moher et al. (2009). Strategi ini mencakup empat tahapan utama, yaitu: identifikasi literatur, penyaringan awal berdasarkan judul dan abstrak, evaluasi kelayakan berdasarkan isi penuh, dan tahap inklusi akhir.

Literatur ditelusuri dari sejumlah basis data akademik bereputasi tinggi, baik nasional maupun internasional, seperti Scopus, ScienceDirect, Emerald, IEEE Xplore, Academic Search Complete, IGI Global, serta Portal Garuda. Batasan pencarian mencakup artikel yang dipublikasikan dalam bahasa Indonesia atau Inggris selama rentang waktu 2000–2024, dengan fokus pada topik adaptasi perubahan iklim dalam pengelolaan pariwisata dan tata kelola destinasi.

Dalam proses identifikasi literatur, dilakukan penelusuran awal terhadap berbagai publikasi ilmiah dari basis data nasional dan internasional yang bereputasi. Tahap pertama melibatkan penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, untuk memastikan keterkaitan substansial dengan topik adaptasi iklim dan tata kelola pariwisata. Artikel-artikel yang tidak relevan pada tahap ini langsung dikeluarkan dari daftar. Selanjutnya, dilakukan seleksi terhadap ketersediaan akses penuh untuk menjamin kedalaman kajian terhadap isi artikel. Pada tahap evaluasi kelayakan, hanya artikel yang secara eksplisit membahas strategi adaptasi, pendekatan tata kelola, serta pengelolaan destinasi yang dipertahankan untuk analisis lebih lanjut. Proses ini menghasilkan sejumlah publikasi yang dinilai representatif dan relevan, baik dari sisi konteks geografis, pendekatan metodologi, maupun kontribusi teoretis terhadap penguatan tata kelola adaptif dalam sektor pariwisata.

Karakteristik Studi Terpilih

Studi-studi terpilih menunjukkan variasi konteks geografis, metodologi, serta fokus tematik yang saling melengkapi. Sebagian besar studi berasal dari negara-negara dengan destinasi wisata yang rentan terhadap perubahan iklim, seperti Indonesia, Thailand, Jepang, Spanyol, dan Australia. Fokus utama berkisar pada isu model tata kelola adaptif, strategi kebijakan, keterlibatan komunitas, kapasitas kelembagaan, serta implementasi adaptasi berbasis lokal.

Berikut adalah ringkasan karakteristik literatur yang dijadikan dasar sintesis:

Tabel 1. Ringkasan Karakteristik Literatur

No	Penulis & Tahun	Konteks Studi	Fokus Topik / Variabel	Metode Penelitian
1	Utama & Widyastuti (2022)	Komunitas wisata pedesaan di Bali	Pengelolaan destinasi berbasis komunitas	Kualitatif – Studi kasus
2	Chan et al. (2020)	Pemerintah daerah kawasan pesisir	Integrasi kebijakan iklim dalam perencanaan	Campuran – Mixed Methods
3	Hall (2019)	Pembuat kebijakan & akademisi	Governance & resiliensi iklim	Studi dokumen / Kebijakan
4	Kimura (2018)	Resor pegunungan dan operator wisata	Manajemen risiko dan adaptasi iklim	Kualitatif – Studi kasus
5	Garcia et al. (2021)	Kota wisata pesisir	Adaptive governance dalam pengelolaan destinasi	Kuantitatif – Survei

Pembahasan

Pembahasan ini disusun untuk menguraikan hubungan antar variabel utama yang telah diidentifikasi dalam kajian literatur sistematis. Setiap subbagian mengeksplorasi keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat secara mendalam, mengintegrasikan temuan dari lima studi utama yang telah dianalisis pada Tabel 1, serta membandingkannya dengan temuan-temuan dari penelitian terdahulu. Pendekatan ini bertujuan memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap pengembangan kerangka tata kelola pariwisata yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Hubungan antara Model Tata Kelola Adaptif dan Ketahanan Destinasi

Model tata kelola adaptif berperan krusial dalam meningkatkan ketahanan destinasi wisata terhadap berbagai tekanan lingkungan, terutama akibat perubahan iklim. Studi Hall (2019) menekankan bahwa fleksibilitas kelembagaan dan kemampuan pemerintah dalam menyediakan sistem informasi risiko yang akurat dan responsif merupakan prasyarat penting untuk membangun destinasi yang tangguh. Pengambilan keputusan yang desentralistik dan berbasis data lokal memungkinkan tindakan adaptasi dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Temuan ini diperkuat oleh studi Khadka dan Vacik (2022), yang menemukan bahwa keberhasilan strategi adaptasi di Nepal sangat dipengaruhi oleh struktur kelembagaan yang responsif dan partisipatif. Sebaliknya, studi Rodríguez et al. (2018) di Kolombia mengungkap

bahwa kebijakan desentralisasi saja tidak cukup. Keterbatasan sumber daya, lemahnya kapasitas teknis, serta ketergantungan terhadap otoritas pusat justru menghambat kemampuan destinasi untuk beradaptasi secara efektif.

Kontribusi penting dari penelitian ini terletak pada penekanannya terhadap pentingnya keterhubungan vertikal dan horizontal dalam struktur tata kelola, tidak hanya di level pusat atau lokal, tetapi juga dalam koordinasi antar aktor dan sektor. Studi Garcia et al. (2021) secara eksplisit menunjukkan bahwa hubungan kolaboratif antar tingkatan pemerintahan dan lintas institusi menjadi determinan utama efektivitas adaptasi. Oleh karena itu, pendekatan dalam kajian ini memberikan perspektif baru bahwa ketahanan destinasi tidak cukup dibangun melalui desain kelembagaan formal, melainkan harus disesuaikan dengan dinamika lokal dan modal sosial yang berkembang.

Hubungan antara Partisipasi Komunitas dan Efektivitas Pengelolaan Destinasi

Partisipasi aktif masyarakat lokal terbukti meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi, baik dari segi legitimasi kebijakan maupun keberlanjutan implementasinya. Studi Utama dan Widyastuti (2022) menunjukkan bahwa pelibatan komunitas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di Bali memperkuat penerimaan sosial terhadap program adaptasi dan mendorong inovasi berbasis lokalitas.

Hal serupa ditemukan oleh Moreno dan Becken (2020), yang meneliti adaptasi berbasis ekosistem di kawasan pesisir Meksiko. Mereka menyimpulkan bahwa integrasi masyarakat ke dalam pengambilan keputusan menghasilkan respons yang lebih kontekstual dan relevan. Namun, Ruhanen et al. (2017) mencatat hal berbeda dalam studi di Australia, di mana partisipasi masyarakat justru memperlambat proses adaptasi akibat konflik kepentingan antar kelompok dan minimnya fasilitasi dari pihak pemerintah.

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui variasi kesiapan sosial dan kapasitas kelembagaan yang mendukung partisipasi. Dalam konteks penelitian ini, partisipasi komunitas dipandang efektif apabila disertai dengan peningkatan kapasitas masyarakat, akses terhadap informasi yang setara, serta mekanisme fasilitasi yang adil. Dengan demikian, temuan ini memperluas pemahaman tentang partisipasi, tidak hanya sebagai representasi formal, tetapi sebagai proses transformasi sosial yang berkelanjutan.

Hubungan antara Integrasi Kebijakan Perubahan Iklim dan Keberhasilan Adaptasi Destinasi

Integrasi kebijakan perubahan iklim dengan kebijakan pengelolaan pariwisata terbukti menjadi elemen kunci dalam mendukung keberhasilan adaptasi destinasi. Chan et al. (2020) mencatat bahwa kebijakan terpadu di kawasan pesisir Thailand memungkinkan

pembentukan sistem peringatan dini, penguatan kapasitas pemerintah daerah, dan efisiensi dalam alokasi anggaran untuk kegiatan adaptasi.

Temuan ini sejalan dengan studi global oleh Berrang-Ford et al. (2021), yang menegaskan bahwa keberhasilan adaptasi sangat bergantung pada seberapa baik kebijakan lintas sektor dapat saling memperkuat (policy coherence). Namun, Colenbrander et al. (2016) mencatat bahwa meskipun terdapat sinergi kebijakan secara tertulis di Afrika Selatan, fragmentasi kelembagaan dan tumpang tindih kewenangan justru menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini memperluas cakupan pembahasan dengan menekankan bahwa integrasi kebijakan tidak hanya perlu dilakukan secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga secara horizontal antar sektor seperti transportasi, keuangan, mitigasi bencana, dan perencanaan wilayah. Ini menjadi diferensiasi utama dari studi sebelumnya yang cenderung fokus pada hubungan vertikal semata. Pendekatan lintas sektor yang diusulkan dalam kajian ini menekankan perlunya sinergi institusional yang berkelanjutan dalam merespons tantangan iklim secara komprehensif.

Hubungan antara Kapasitas Kelembagaan dan Implementasi Strategi Adaptasi

Kapasitas kelembagaan memainkan peran penting dalam efektivitas implementasi strategi adaptasi. Kimura (2018) dalam studinya di Jepang menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan risiko iklim di resor pegunungan dipengaruhi oleh kemampuan teknis dan ketersediaan sistem informasi yang real-time.

Goh dan Aslam (2023) lebih lanjut mengungkapkan bahwa rendahnya kapasitas kelembagaan di sejumlah negara ASEAN, seperti terbatasnya pelatihan bagi staf daerah dan kurangnya data iklim lokal, menjadi kendala utama dalam pelaksanaan strategi adaptasi. Namun, Beilin et al. (2015) mengingatkan bahwa kapasitas kelembagaan saja tidak menjamin keberhasilan. Ketidakpastian iklim, keragaman sosial, dan faktor politik lokal dapat menjadi faktor penghambat, meskipun institusi secara struktural telah siap.

Penelitian ini menegaskan bahwa kapasitas kelembagaan harus dipahami sebagai entitas multidimensional yang tidak hanya melibatkan sumber daya manusia dan infrastruktur, tetapi juga modal sosial, jaringan kolaboratif, dan adaptabilitas organisasi. Temuan ini memberikan kontribusi teoritis dengan mengusulkan bahwa kelembagaan yang efektif adalah yang mampu mengakomodasi pembelajaran kolektif dan merespons perubahan melalui inovasi lintas sektor.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi tata kelola wisata yang adaptif terhadap perubahan iklim merupakan pendekatan kompleks dan multidimensional yang membutuhkan integrasi antara fleksibilitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta koherensi kebijakan lintas sektor. Model tata kelola yang adaptif terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ketahanan destinasi, khususnya ketika didukung oleh koordinasi yang sinergis antara level pemerintahan (vertikal) dan lintas sektor (horizontal). Partisipasi komunitas lokal menjadi komponen krusial dalam memperkuat efektivitas pengelolaan destinasi, meskipun efektivitas ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan sosial dan kapasitas kelembagaan yang tersedia. Keberhasilan strategi adaptasi juga sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan perubahan iklim terintegrasi secara strategis ke dalam perencanaan dan pengelolaan sektor pariwisata, baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, kapasitas kelembagaan—baik dalam aspek teknis, struktural, maupun sosial—merupakan syarat esensial dalam menjamin implementasi adaptasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, kajian ini berhasil menjawab tujuan penelitian dengan menghadirkan pemahaman konseptual yang mendalam mengenai keterkaitan antara tata kelola, perubahan iklim, dan pengelolaan destinasi berbasis adaptasi.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat kerangka pemikiran bahwa pendekatan *adaptive governance* layak diterapkan dalam sektor pariwisata guna merespons ketidakpastian iklim dan dinamika sosial yang terus berkembang. Integrasi antara perspektif kebijakan publik dan manajemen destinasi menjadi landasan penting dalam merancang strategi adaptasi yang kontekstual dan berbasis bukti. Temuan ini turut membuka ruang bagi pengembangan teori tata kelola pariwisata berbasis sistem sosial-ekologis yang lebih dinamis, responsif, dan inklusif. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi pemangku kebijakan di tingkat lokal dan nasional dalam merumuskan kebijakan pariwisata yang kolaboratif dan berorientasi jangka panjang. Pemerintah dapat menggunakan hasil kajian ini untuk membangun kapasitas kelembagaan, memperkuat kolaborasi multipihak, serta menciptakan sistem perencanaan dan implementasi kebijakan yang berorientasi pada ketahanan destinasi wisata terhadap dampak perubahan iklim.

Meskipun kajian ini dilakukan secara sistematis, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, cakupan literatur yang dianalisis terbatas pada publikasi berbahasa Indonesia dan Inggris, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan perspektif global, khususnya dari kawasan non-bahasa Inggris. Kedua, sebagian besar studi yang dikaji bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus, sehingga hasil sintesis lebih bersifat kontekstual daripada generalisabel. Ketiga, aspek teknologi digital sebagai bagian

dari strategi adaptasi dalam tata kelola wisata belum menjadi fokus eksplisit dalam kajian ini, padahal hal tersebut mulai memainkan peran penting dalam memperkuat respons sektor pariwisata terhadap perubahan iklim.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sumber literatur dengan mengikutsertakan studi berbahasa lain di luar Indonesia dan Inggris guna memperkaya wawasan lintas budaya dan geografis. Selain itu, pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) dapat digunakan untuk mengukur efektivitas strategi adaptasi secara lebih objektif dan komprehensif. Peneliti masa depan juga dianjurkan untuk mengkaji peran teknologi digital dalam mendukung tata kelola wisata adaptif, seperti melalui pemanfaatan sistem peringatan dini berbasis data, pemetaan risiko berbasis GIS, hingga penerapan kecerdasan buatan dalam perencanaan adaptasi. Terakhir, studi komparatif antar negara atau antar jenis destinasi (pesisir, pegunungan, urban, dan rural) dapat memberikan pemahaman yang lebih tajam mengenai variasi tantangan, kapasitas kelembagaan, dan kebutuhan adaptasi yang spesifik pada masing-masing konteks.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelung, B., Nicholls, S., & Viner, D. (2007). Implications of global climate change for tourism flows and seasonality. *Journal of Travel Research*, 45(3), 285–296. <https://doi.org/10.1177/0047287506295937>
- Armitage, D., Plummer, R., Berkes, F., Arthur, R. I., Charles, A. T., Davidson-Hunt, I. J., ... & Wollenberg, E. (2009). Adaptive co-management for social–ecological complexity. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 7(2), 95–102. <https://doi.org/10.1890/070089>
- Beilin, R., Reichelt, N., King, B. J., Long, A., & Nettle, R. (2015). Transition landscapes and social networks: Examining on-ground community resilience and its implications for policy settings in multi-scalar systems. *Ecology and Society*, 20(3), 23. <https://doi.org/10.5751/ES-07759-200323>
- Belle, N., & Bramwell, B. (2005). Climate change and small island tourism: Policy maker and industry perspectives in Barbados. *Journal of Travel Research*, 44(1), 32–41. <https://doi.org/10.1177/0047287505276590>
- Berrang-Ford, L., Siders, A. R., Lesnikowski, A., Fischer, A. P., Callaghan, M., Haddaway, N. R., ... & Mach, K. J. (2021). A systematic global stocktake of evidence on human adaptation to climate change. *Nature Climate Change*, 11(11), 989–1000. <https://doi.org/10.1038/s41558-021-01170-y>
- Beunen, R., & Opdam, P. (2011). When landscape planning becomes landscape governance, what happens to the science? *Landscape and Urban Planning*, 100(4), 324–326.

<https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.01.018>

- Bornhorst, T., Ritchie, J. R. B., & Sheehan, L. (2010). Determinants of tourism success for DMOs & destinations: An empirical examination of stakeholders' perspectives. *Tourism Management*, 31(5), 572–589. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.06.008>
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 411–421. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.580586>
- Chaffin, B. C., Gosnell, H., & Cosens, B. A. (2014). A decade of adaptive governance scholarship: Synthesis and future directions. *Ecology and Society*, 19(3), 56. <https://doi.org/10.5751/ES-06824-190356>
- Chan, S., Phonboon, K., & Thongplew, N. (2020). Climate policy integration and policy coherence: A case of climate adaptation in Thailand's tourism sector. *Environmental Policy and Governance*, 30(4), 195–206. <https://doi.org/10.1002/eet.1878>
- Colenbrander, S., Archer, D., & Dodman, D. (2016). Using climate finance to advance climate justice: The politics and practice of channelling resources to the local level. *Climate Policy*, 18(7), 902–915. <https://doi.org/10.1080/14693062.2017.1388212>
- Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., & Norberg, J. (2005). Adaptive governance of social–ecological systems. *Annual Review of Environment and Resources*, 30(1), 441–473. <https://doi.org/10.1146/annurev.energy.30.050504.144511>
- Fyall, A., Garrod, B., & Wang, Y. (2012). Destination collaboration: A critical review of theoretical approaches. *Journal of Destination Marketing & Management*, 1(1–2), 10–26. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2012.10.002>
- Garcia, C. J., Benavides, J., & Muñoz, A. (2021). Adaptive governance in coastal tourism: An empirical test of institutional factors in Spain. *Tourism Management Perspectives*, 37, 100781. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100781>
- Goh, E., & Aslam, M. S. M. (2023). Governance capacity and climate adaptation strategies: Evidence from tourism policy in Southeast Asia. *Journal of Sustainable Tourism*. <https://doi.org/10.1080/09669582.2023.2181374>
- Gössling, S., & Hall, C. M. (2021). *Tourism and climate change: Impacts, adaptation and mitigation* (2nd ed.). Channel View Publications.
- Hall, C. M. (2019). Constructing sustainable tourism development: The 2030 Agenda and the managerial ecology of sustainable tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(7), 1044–1060. <https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1560456>
- IPCC. (2021). *Climate change 2021: The physical science basis*. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate

- Change. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>
- Khadka, C., & Vacik, H. (2022). Adaptive governance for sustainable tourism: Exploring Nepal's protected area tourism. *Sustainability*, 14(6), 3251. <https://doi.org/10.3390/su14063251>
- Kimura, F. (2018). Managing climate risk in mountain tourism: A case study from Japan. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 24, 27–36. <https://doi.org/10.1016/j.jort.2018.08.001>
- Mihalič, T. (2000). Environmental management of a tourist destination: A factor of tourism competitiveness. *Tourism Management*, 21(1), 65–78. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(99\)00096-5](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00096-5)
- Moreno, A., & Becken, S. (2009). A climate change vulnerability assessment methodology for coastal tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 17(4), 473–488. <https://doi.org/10.1080/09669580902780975>
- Moreno, A., & Becken, S. (2020). A climate change vulnerability assessment methodology for coastal tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(3), 386–406. <https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1684931>
- Rodríguez, L. F., Zambrano, M. M., & Jiménez, F. M. (2018). Challenges for governance and sustainable development in the Colombian Caribbean. *Sustainable Development*, 26(4), 366–375. <https://doi.org/10.1002/sd.1718>
- Ruhanen, L., Weiler, B., Moyle, B. D., & McLennan, C. J. (2017). Stakeholder perceptions of tourism policy success: A comparison between Australia and Finland. *Tourism Management*, 63, 165–177. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.06.004>
- Scott, D., Gössling, S., & Hall, C. M. (2012). International tourism and climate change. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 3(3), 213–232. <https://doi.org/10.1002/wcc.165>
- Scott, D., Hall, C. M., & Gössling, S. (2019). Climate change and tourism geographies: A review and research agenda. *Tourism Geographies*, 22(5), 668–695. <https://doi.org/10.1080/14616688.2019.1613981>
- Simmons, D. G. (1994). Community participation in tourism planning. *Tourism Management*, 15(2), 98–108. [https://doi.org/10.1016/0261-5177\(94\)90003-5](https://doi.org/10.1016/0261-5177(94)90003-5)
- United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2023). *Climate action in the tourism sector: An overview of methodologies and tools to measure greenhouse gas emissions*. <https://doi.org/10.18111/9789284423927>
- United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2024). *Glasgow Declaration implementation report 2023 – Advancing climate action*.

<https://doi.org/10.18111/9789284425242>

- Utama, I. G. B. R., & Widyastuti, D. A. (2022). Community-based tourism resilience and climate adaptation in Bali: A local governance perspective. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 211–225. <https://doi.org/10.22146/jsp.66436>
- Utama, I. G. B. R., & Widyastuti, T. (2022). The community participation in the development of Gunung Salak Tourism Village, Tabanan, Bali, Indonesia. *Indonesian Journal of Tourism and Leisure*, 3(1), 39–46. <https://doi.org/10.36256/ijtl.v3i1.224>
- Yakin, I. H., Supriatna, U., Rusdian, S., & Global Akademia, M. (2023). Metodologi Penelitian (Kuantitatif & Kualitatif). *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*.